Pemerintah Kabupaten Jombang
Kecamatan Bareng

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024

KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Bareng merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng yang berpedoman RKPD Tahun 2024 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Kecamatan Bareng sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pada tahun 2024. Program dan kegiatan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang disusun berdasarkan orientasi dalam mewujudkan Visi Bupati terpilih yaitu *"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*, dan untuk mendukung tercapainya Misi Pertama Bupati terpilih yaitu **"***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional"*

Harapan kami semoga Renja Kecamatan Bareng Tahun 2024 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien,partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bareng, 12 Juli 2023

CAMAT BARENG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN BARENG

USMAN, SE.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710806 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 45
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62
3.1 Telahaan Terhadap perubahan Kebijakan Nasional 62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 63
3.3 Program dan Kegiatan 64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 76
BAB V PENUTUP 77

Lampiran – Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam UU nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 menyebutkan Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut kecamatan berada dalam posisi strategis dimana Camat sebagai pimpinan tertinggi harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, juga harus memberikan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaiamana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;

- Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bareng.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD yang dalam hal ini Rencana Kerja Kecamatan Bareng, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa dan Kecamatan mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Botom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Bareng Tahun 2024 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan tema/arah pembangunan daerah tahun 2024 yang harus dapat diwujudkan adalah **"Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul"** serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13. Keptutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
20. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050/1034/415.01/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Kerja PD Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang maka pada tahun 2022 diarahkan pada pencapaian Misi yang ke-1 yakni: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.

Dalam rangka mendukung Misi tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bareng pada tahun 2022 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Kewilayahan 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 13 Kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

			Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
		Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemelihraan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

			Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangn-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan secara umum mengalami peningkatan baik penyerapan anggaran kegiatan. Rata-rata capaian kinerja kegiatan pada tahun 2022 mencapai 102,11% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,71%.

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2022 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

Semua program/kegiatan/Sub Kegiatan **tidak ada** yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja tercapai 100%, dan penyerapan anggaran 98,06%
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,51%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,89%
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,77%
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tercapai 100% dengan penyerapan anggaran 100%
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Akhir Tahun SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,89%
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,89%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,63%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,93%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,87%
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,33%
- Penyediaan Bahan Logistik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,98%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 74,32%

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,79%
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,79%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,36%
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 85,12%
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 91,87%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,39%
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 95,06%
    - Pemelihraan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,95%
    - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,39%

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,36%
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,36%

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,94%

9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,94%
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,94%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,36%

10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,36%
    - Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangn- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,36%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
    - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,98%

12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
    - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,98%

C. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK dengan indikator kinerja nilai PATEN ditargetkan 81 tercapai 81,24 dengan capaian kinerja 100,30% dan penyerapan anggaran 98,36%

D. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

<u>Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan:</u>

1. Dukungan dan komitmen Camat Bareng, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Bareng untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014
3. Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Bareng yang kompoten di bidangnya
4. Seluruh stakeholder Kecamatan memahami tupoksi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen PK, sehingga kinerja dapat tercapai maksimal.
5. Adanya monitoring kinerja setiap tribulan dari atasan dapat mengidentifikasi kendala dan masalah dalam pencapaian target kinerja.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng. Dari program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bareng sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bareng pada umumnya,
- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target/ melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Bareng.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2022.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bareng dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
7.01.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	N/A	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	N/A	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bareng yang di fasilitasi	N/A	N/A	14 Bulan	14 Bulan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	12 Kali	12 Kali	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	3 Jenis	3 Jenis	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	5 Jenis	5 Jenis	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	N/A	N/A	20 Buku	20 Buku	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	N/A	N/A	5000 Lembar	5000 Lembar	100%	N/A	N/A	N/A

7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	N/A	N/A	1 Jenis	1 Jenis	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	N/A	N/A	3 Unit	3 Unit	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	N/A	18 Stel	18 Stel	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	N/A	N/A	3 Jenis	3 Jenis	100%	N/A	N/A	N/A

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	N/A	N/A	12 Kali	12 Kali	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	N/A	N/A	10 Unit	10 Unit	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	N/A	N/A	10 Unit	10 Unit	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara	N/A	N/A	2 Unit	2 Unit	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	N/A	10 Unit	10 Unit	10 Unit	N/A	N/A	N/A
7.01.05	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA**	**N/A**	**N/A**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	**N/A**	**N/A**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.02	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Nilai Paten Kecamatan**	**N/A**	**N/A**	**81**	**81,24**	**100,30%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**1000%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.03	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	**N/A**	**N/A**	**26 Lembaga**	**26 Lembaga**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1. .Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu**	**N/A**	**N/A**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	**N/A**	**N/A**	**26 Lembaga**	**26 Lembaga**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
		2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	N/A	N/A	13 BUMDes	13 BUMDes	100%	N/A	N/A	N/A
		3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	N/A	N/A	13 TP PKK	13 TP PKK	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.06	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa**	**N/A**	**N/A**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.04	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum**	**N/A**	**N/A**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	N/A	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01	**Program penunjang urusan pemerintahan**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	14 Orang / Bulan	14 Orang / Bulan	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng**	**N/A**	**N?A**	**N?A**	**N?A**	**N?A**	**100%**	**100%**	**100%**

7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N?A	N?A	N?A	N?A	100%	100%	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	6 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	6 paket	6 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	21 paket	21 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	11 Bulan	11 Bulan	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	2 paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Jenis	1 Jenis	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	26 laporan	26 laporan	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 unit	10 unit	100%

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	16 unit	16 unit	100%
7.01.05	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA**	**4 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**4 laporan**	**4 laporan**	**100%**
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	100 orang	100%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%

7.01.02	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Nilai Paten Kecamatan**	**82,00**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**82,00**	**82,00**	**100%**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.03	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 Lembaga**	**26 Lembaga**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu**	**26 Desa**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 Desa**	**26 Desa**	**100%**
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 Lembaga**	**26 Lembaga**	**100%**

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%
7.01.06	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa**	**26 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**	**100%**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	100%
7.01.04	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan identifikasi kasuspelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan**	**12 kegiatan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**100%**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Bareng merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Bareng, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Bareng adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bareng menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

   Sampai dengan periode tribulan IV tahun 2022 Kecamatan Bareng menyusun 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen renja 2023, Perubahan Renja 2022 dan Perubahan Renstra 2018-2023. Pengendalian dan Evaluasi Program sebanyak 5 dokumen yaitu dokumen LKJiP 2022, monitoring capaian kinerja dan anggaran tribulan 1,2,3 dan 4

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

   Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terlaksananya musrenbang kecamatan, terlaksananya musrenbangdes di 13 desa, koordinasi dan patrol keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng, terlaksananya penyebarluasan informasi dan penyuluhan bagi masyarakat seperti penyuluhan PSN, peringatan HUT RI, Rapat Pleno Rutin PKK setiap bulan, koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KIS, Bansos dll, pembinaan administrasi pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang meliputi pelayaanan KK, perekaman KTP, surat pindah, SKCK, dll.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Bareng menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9				10	14
1	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	-	-	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	100%	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.1	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	-	-	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	100%	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	-	-	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	
1.1.2	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	-	-	5 laporan	N/A	N/A	N/A	5 laporan	N/A	N/A	N/A	
1.2	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.2.1	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bareng yang di fasilitasi	-	-	14 bulan	N/A	N/A	N/A	14 bulan	N/A	N/A	N/A	
1.2.2	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	-	-	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	

1.2.3	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	12 Kali	N/A	N/A	N/A	12 Kali	N/A	N/A	N/A	
1.3	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**				
1.3.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	-	-	16 stel	N/A	N/A	N/A	16 stel				
1.3	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.3.1	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	5 Jenis	N/A	N/A	N/A	5 Jenis	N/A	N/A	N/A	
1.3.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	-	-	5 Jenis	N/A	N/A	N/A	5 Jenis	N/A	N/A	N/A	
1.3.3	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	-	-	11 Bulan	N/A	N/A	N/A	11 Bulan	N/A	N/A	N/A	
1.3.4	Jumlah pemenuhan barang cetak	-	-	20 Buku	N/A	N/A	N/A	20 Buku	N/A	N/A	N/A	
1.3.5	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	-	-	10081 lembar	N/A	N/A	N/A	10081 lembar	N/A	N/A	N/A	
1.3.6	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	-	-	1 jenis	N/A	N/A	N/A	1 jenis	N/A	N/A	N/A	
1.3.7	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	
1.4	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	

1.4.1	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.4.2	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	-	-	3 unit	N/A	N/A	N/A	3 unit	N/A	N/A	N/A	
1.5	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.5.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	-	-	16 Stel	N/A	N/A	N/A	16 Stel	N/A	N/A	N/A	
1.6	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.6.2	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	-	-	12 bulan	N/A	N/A	N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	
1.6.3	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	-	-	12 Kali	N/A	N/A	N/A	12 Kali	N/A	N/A	N/A	
1.7	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	**-**	**-**	1 unit	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	
1.7.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	-	-	10 Unit	N/A	N/A	N/A	10 Unit	N/A	N/A	N/A	
1.7.3	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara	-	-	2 Unit	N/A	N/A	N/A	2 Unit	N/A	N/A	N/A	
1.7.4	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	10 unit	N/A	N/A	N/A	10 unit	N/A	N/A	N/A	

2	**Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2.1	**Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA**	**-**	**-**	**1 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**1 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2.1.1	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	
3	**Nilai Paten Kecamatan**	**-**	**-**	**81**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**81,24**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
3.1	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
3.1.1	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
3.1.2	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
4	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
4.1	**1. .Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu**	**-**	**-**	**26 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
4.2	**2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibi**	**-**	**-**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
4.1.1	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	-	-	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	
4.2.1	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	-	-	13 BUMDes	N/A	N/A	N/A	13 BUMDes	N/A	N/A	N/A	

4.2.2	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	-	-	13 TP-PKK	N/A	N/A	N/A	13 TP-PKK	N/A	N/A	N/A	
5	**Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
5.1	**Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa**	**-**	**-**	**26 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
5.1.1	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	**-**	**-**	26 laporan	N/A	N/A	N/A	26 laporan	N/A	N/A	N/A	
6	**Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait**	**-**	**-**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
6.1	**Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum**	**-**	**-**	**12 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**12 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
6.1.1	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	
1	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**0%**	**N/A**	**N/A**	
1.1	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**38%**	**N/A**	**N/A**	

1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	
1.2	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	14 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	16 orang/bulan	N/A	N/A	
1.2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	
1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	6 dokumen	N/A	N/A	
1.3	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
1.3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	6 paket	N/A	N/A	N/A	6 paket	N/A	N/A	
1.3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	21 paket	N/A	N/A	N/A	21 paket	N/A	N/A	

1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	11 Paket	N/A	N/A	N/A	11 Paket	N/A	N/A	
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	2 paket	N/A	N/A	
1.3.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	
1.3.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	
1.3.7	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	N/A	**100%**	N/A	N/A	N/A	**0%**	N/A	N/A	
1.4	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.4.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.5.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.6	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**-**	**-**	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	6 laporan	N/A	N/A	

1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	25 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	
1.6.3	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	N/A	**100%**	N/A	N/A	N/A	**50%**	N/A	N/A	
1.7	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**-**	**-**	**N/A**	**10 unit**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**7 Unit**	**N/A**	**N/A**	
1.7.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.7.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	16 unit	N/A	N/A	N/A	7 Unit	N/A	N/A	
1.7.3	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	
1.7.4	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	
2	**Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA**	**-**	**-**	**N/A**	**1 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2.1	**Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam**	**-**	**-**	**N/A**	**4 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**2 dokumen**	**N/A**	**N/A**	
2.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**-**	**-**	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	

3	**Nilai Paten Kecamatan**	**-**	**-**	**N/A**	**82**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
3.1	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
3.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	
4	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	**-**	**-**	**N/A**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	
4.1	**Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina**	**-**	**-**	**N/A**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	
4.2	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**-**	**-**	**N/A**	**4 laporan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**4 laporan**	**N/A**	**N/A**	
4.1.1	**Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
4.2.1	**Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	
4.2.2	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	13 dokumen	N/A	N/A	
4.2.3	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	13 dokumen	N/A	N/A	

5	**Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait**	**-**	**-**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	**N/A**	
5.1	**Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan**	**-**	**-**	**N/A**	**12 kegiatan**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**6 kegiatan**	**N/A**	**N/A**	
5.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	6 laporan	N/A	N/A	
1	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
1.1	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	
1.2	**1. Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	

1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	N/A	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	
1.3	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
1.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	38 paket	38 paket	N/A	N/A	38 paket	38 paket	
1.4	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	8 paket	8 paket	N/A	N/A	8 paket	8 paket	
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	24 paket	24 paket	N/A	N/A	24 paket	24 paket	
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 paket	1 paket	N/A	N/A	1 paket	1 paket	
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	2 paket	2 paket	N/A	N/A	2 paket	2 paket	
1.4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	

1.4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
1.5	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
1.5.1	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**1 unit**	**1 unit**	**N/A**	**N/A**	**1 unit**	**1 unit**	
1.5.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	3 unit	4 unit	N/A	N/A	3 unit	4 unit	
1.6	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	36 laporan	36 laporan	N/A	N/A	36 laporan	36 laporan	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	25 laporan	25 laporan	N/A	N/A	25 laporan	25 laporan	
1.7	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	N/A	N/A	10 unit	10 unit	N/A	N/A	10 unit	10 unit	
1.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	2 unit	2 unit	
1.7.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	16 unit	16 unit	N/A	N/A	16 unit	16 unit	
2	**Nilai Paten Kecamatan**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**85.3 nilai**	**85.4 nilai**	**N/A**	**N/A**	**85.3 nilai**	**85.4 nilai**	

2.1	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	
3	**Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
3.1	**Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**5 laporan**	**5 laporan**	**N/A**	**N/A**	**5 laporan**	**5 laporan**	
3.2	**Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**N/A**	**N/A**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	
3.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	N/A	N/A	100 orang	100 orang	N/A	N/A	100 orang	100 orang	
3.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	
4	**Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
4.1	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	

4.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	
5	**Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
5.1	**Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**13 desa**	**13 desa**	**N/A**	**N/A**	**13 desa**	**13 desa**	
5.1.1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	N/A	N/A	26 dokumen	26 dokumen	
6	**Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**N/A**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	
6.1	**Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**26 lembaga**	**26 lembaga**	**N/A**	**N/A**	**26 lembaga**	**26 lembaga**	
6.2	**Jumlah Desa yang menyusun RKPDes**	**-**	**-**	**N/A**	**N/A**	**13 desa**	**13 desa**	**N/A**	**N/A**	**13 desa**	**13 desa**	
6.1.1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	-	-	N/A	N/A	78 lembaga kemasyakatan	78 lembaga kemasyakatan	N/A	N/A	78 lembaga kemasyakatan	78 lembaga kemasyakatan	
6.2.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

   Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Bareng dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Isu – isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Bareng dapat dikategorikan dalam uraian – uraian berikut ini ::

   a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

      Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Bareng adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan

   b. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

      Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan

   c. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

      Pembinaan Pemerintah Desa yang kurang terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

   d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

      Dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat, seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di

susun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

e. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Bareng karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah **"Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan"**.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
   a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam PRPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023
   b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
   c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Bareng belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah kelima yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2023 yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

   Tantangan :

   a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;
   b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
   c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
   d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
   e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Bareng saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e –

KTP terkadang tidak dapat dioperasionalkan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;

f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Bareng cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Bareng terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
   a. Perencanaan Pembangunan
      - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam,

tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.

- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perubahan rencana strategis tahun 2018-2023 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Kecamatan Bareng dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Bareng dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bareng di tuntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal yang bisa kita lihat dalam indeks kepuasan masyarakat yang selalu meningkat setiap tahun dan untuk mempertahankan dan memperbaiki indeks kepuasan masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang up to date.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan kepada Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih

e. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Diperlukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur desa untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang kompeten dan tertib administrasi sehingga untuk pemenuhan dokumen dokumen seperti penyusunan RKPDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dapat tepat waktu

f. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih kurangnya kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Bareng karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat di ikuti oleh pegawai

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Bareng sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodesasi 2005-2025 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2024.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Bareng dalam melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertangggungjawab, inovatif dan kapabel. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean goverment dan good governance.

Kecamatan Bareng mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Kecamatan Bareng membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan

pembangunan yang cukup banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bareng.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Jombang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
1	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Bareng**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**100%**	**3,254,253,457**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Bareng**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**100%**	**2,719,507,532**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**19,308,000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**6,074,200**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	14,040,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5,286,600	

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5,268,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	787,600	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**100%**	**2,707,469,657**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	**100%**	**2,324,069,812**	
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	**100%**				**Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan**	**100%**		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	2,630,136,057	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	2,247,429,212	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75,678,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75,678,000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,655,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	962,600	

1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng**	**100%**	**15,800,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng**	**100%**	**11,400,000**	
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Bareng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	15,800,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Bareng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	11,400,000	
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**128,399,200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**75.804.350**	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	8 paket	5,732,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	8 paket	3,348,600	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	23,170,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	14,956,400	
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	65,025,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	55,480,000	
1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6,308,800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4,996,219	

1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,352,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	25,810,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	28,458,000	
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**156,314,600**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**67,728,301**	
1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	117,027,600	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bareng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	39,287,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bareng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	67,728,301	
1.6	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**101,620,000**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**117,220,000**	
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	49,200,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	64,800,000	

1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	52,420,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	52,420,000	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**125,342,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**83,424,000**	
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	83,858,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	41,250,000	
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	11,394,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	33,444,000	
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	30,090,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	8,730,000	
2	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Bareng**	**Nilai Paten Kecamatan**	**85.3**	**13,095,000**	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Bareng**	**Nilai Paten Kecamatan**	**85.3**	**6,544,400**	
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Bareng**	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**100%**	**13,095,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Bareng**	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**100%**	**6,544,400**	

2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	13,095,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	6,544,400	
5	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec. Bareng**	**Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**100%**	**71,364,600**	**Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec. Bareng**	**Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**100%**	**72,664,400**	
		Kec. Bareng	**Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti**	**100%**			**Kec. Bareng**	**Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti**	**100%**		
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**5 laporan**	**71,364,600**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**5 laporan**	**72,664,400**	
		Kec. Bareng	**Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam**	**4 dokumen**			**Kec. Bareng**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam**	**4 dokumen**		
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	27,314,800	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	25,550,000	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	44,049,800	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	47,114,400	

4	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Bareng**	**Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkaitke Instansi Terkait**	**100%**	**28,604,800**	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Bareng**	**Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkaitke Instansi Terkait**	**100%**	**28,348,200**	
4.1	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**	**100%**	**28,604,800**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Bareng**	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**	**12 kegiatan**	**28,348,200**	
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	28,604,800	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	28,348,200	

6	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Bareng**	**Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu**	**100%**	**22,725,000**	**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Bareng**	**Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu**	**100%**	**15,848,500**	
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap**	**13 desa**	**22,725,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Bareng**	**Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap**	**13 desa**	**15,848,500**	
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	22,725,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	15,848,500	
3	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Bareng**	**Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyakat yang aktif**	**100%**	**84,229,600**	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Bareng**	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	**100%**	**38,492,000**	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bareng	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	84,229,600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bareng	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	38,492,000	
			Jumlah desa yang menyusun RKPDes	13 desa				Jumlah desa yang menyusun RKPDes	13 desa		

3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	78 lembaga	47,850,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	78 lembaga	15,281,000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	36,379,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	23,211,000	
TOTAL					**3,474,272,457**	**TOTAL**				**2,881,405,032**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Bareng sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Bareng didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kecamatan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bareng dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang berkaitan dengan :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.

b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan sinergitas kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting* data,
d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Bareng sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada RKPD Kab. Jombang Tahun 2024, maka ditetapkan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Kec. Bareng**	**Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan**	**100%**	

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Laporan	Menambah anggaran rapat stunting dan kemiskinan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema , "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusi" yang dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional (PN):

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana kerja Daerah harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah oleh karena itu tema/ arah pembangunan daerah tahun 2024 adalah **“Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna**

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul" yang dijabarkan dalam 4 prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat, Keamanan dan Ketentraman Umum
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimana merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2024 terdapat 3 (empat) prioritas pembangunan, dengan tema/arah pembangunan daerah pada tahun 2024 yaitu "**Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul**".

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2024 adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran OPD Kecamatan Bareng tahun 2024 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP dengan target 72,5
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng dengan target 6,72

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian Tujuan Daerah

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Bareng diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan sasaran RPD adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” yang selaras dengan tujuan OPD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi”

- Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

  SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Bareng diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

  Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Bareng. Program dan kegiatan yang dirancang pada Renja 2024 Pd Kecamatan Bareng yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitasi dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bareng diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang

terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

  Kecamatan Bareng sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan lis, pengrajin sepatu, dan sektor pertanian baik padi, jagung, sayur serta tembakau pada musim tertentu. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Bareng melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

- **Jumlah Program dan Kegiatan**

  Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2024 mencakup 6 Program, 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

a. Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- **Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan**

  Dari 6 (empat) program dan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan di Kecamatan Bareng sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bareng dan melingkupi semua Desa (13 Desa).

- **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

  Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2024 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.881.405.032,-

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan

kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BARENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan				2,881,405,032.00	Dana Alokasi Umum			3,473,901,025
7.01	Kecamatan				2,881,405,032.00	Dana Alokasi Umum			3,473,901,025
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kecamatan Bareng	100%	2,719,507,532.00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	3,370,045,225
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kecamatan Bareng	100%	6,074,200.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	7,829,750
7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	2 dokumen	5,286,600.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 Dokumen	7,139,850
7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bareng	5 dokumen	787,600.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	5 Dokumen	689,900

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kecamatan Bareng	100%	2,324,069,812.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	2,937,689,905
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kecamatan Bareng	100%				100%	
7.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bareng	16 orang/ bulan	2,247,429,212.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	16 orang/ bulan	2,863,491,905
7.01.01.2.02.0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bareng	12 dokumen	75,678,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 dokumen	71,598,000
7.01.01.2.02.0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bareng	1 Laporan	962,600.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 Laporan	2,600,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	Kecamatan Bareng	100%	11,400,000.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	13,300,000
7.01.01.2.05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bareng	38 paket	11,400,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	38 paket	13,300,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Bareng	100%	109,591,219.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	111,175,270
7.01.01.2.06.0001	1. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	8 paket	3,348,600.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	8 Paket	5,049,470
7.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	24 paket	14,956,400.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	24 Paket	16,810,800

7.01.01.2.06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 paket	55,480,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 paket	65,135,000
7.01.01.2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	2 paket	4,996,219.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 paket	5,300,000
7.01.01.2.06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 dokumen	2,352,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 dokumen	2,220,000
7.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bareng	4 laporan	28,458,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	16,660,000
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Bareng	100%	67,728,301.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	158,890,300
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	N/A	-	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	1 Unit	117,027,600
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	3 Unit	67,728,301.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 Unit	41,862,700
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Bareng	100%	117,220,000.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	87,520,000
7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bareng	36 laporan	64,800,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	36 Laporan	35,100,000
7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	25 laporan	52,420,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	25 Laporan	52,420,000

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Bareng	100%	83,424,000.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	53,640,000
7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bareng	10 unit	41,250,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	10 unit	30,104,000
7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	2 unit	33,444,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 unit	10,100,000
7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	16 unit	8,730,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	16 Unit	13,436,000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan Bareng	85.3	6,544,400.00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	85.4	6,975,800
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kecamatan Bareng	100%	6,544,400.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	6,975,800
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	12 laporan	6,544,400.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 laporan	6,975,800
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kecamatan Bareng	100%	72,664,400.00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	30,496,600
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kecamatan Bareng	100%		Dana Alokasi Umum		100%	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kecamatan Bareng	5 laporan	72,664,400.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	5 laporan	30,496,600
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Kecamatan Bareng	4 dokumen				4 dokumen	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bareng	100 orang	25,550,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	100 orang	21,846,800
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	47,114,400.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	8,649,800
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan Bareng	100%	28,348,200.00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	12,951,300
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Kecamatan Bareng	12 kegiatan	28,348,200.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	12 kegiatan	12,951,300
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kecamatan Bareng	12 laporan	28,348,200.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 laporan	12,951,300

7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Kecamatan Bareng	100%	15,848,500.00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	21,527,400
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Kecamatan Bareng	13 desa	15,848,500.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	13 desa	21,527,400
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bareng	26 dokumen	15,848,500.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	26 dokumen	21,527,400
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Kecamatan Bareng	100%	38,492,000.00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	31,904,700
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Kecamatan Bareng	26 lembaga	38,492,000.00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	26 lembaga	31,904,700
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Kecamatan Bareng	13 desa				13 desa	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kecamatan Bareng	78 lembaga	15,281,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	78 lembaga	16,904,700
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	23,211,000.00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	15,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bareng Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2024 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2024 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan kabupaten Jombang adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat, Keamanan dan Ketentraman Umum
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

Tema/arah pembangunan daerah tahun 2022 yang harus dapat diwujudkan adalah “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul” serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bareng. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bareng di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bareng berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024.
b. Kecamatan Bareng berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bareng Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bareng Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

1.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bareng Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Bareng juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Bareng ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati Terpilih serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah kecamatan Bareng, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bareng Tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

Jombang, 12 Juli 2023

CAMAT BARENG

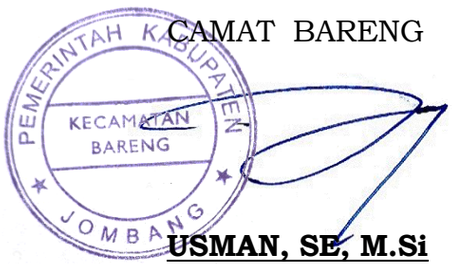

USMAN, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19710806 199803 1 007